

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di seluruh dunia dan disegala kelompok masyarakat dikarenakan selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat patriarki ini biasa terjadi kerana masyarakat dunia kebanyakan masyarakat patriarki. Demikian berabad-abad lamanya mungkin ketika terjadinya zaman perbudakan dimana pembagian kerja secara seksual yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dari kaum perempuan. dan perempuan dalam mengambil suatu keputusan sering kali menggunakan sifat-sifat keibuannya, lemah lembut dan tidak rasional. Hal ini menetapkan bahwa perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki dan harus tunduk pada kekuasaan mereka demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga.

Kini banyaknya struktur-struktur sosial lama telah rapuh dengan diganti dengan tata sosial baru yang lebih rasional dan liberal, sedang mencuat ke permukaan, dalam struktur sosial yang baru ini semakin sulit mempertahankan sikap-sikap lama tentang perempuan dikarenakan banyaknya kelompok-kelompok progresif yang lahir di dalam masyarakat. Masalah perempuan dalam arti tertentu dapat dibandingkan dengan masalah perbudakan, dalam masyarakat feodal dan pra-feodal, perbudakan dianggap suatu yang sangat dapat diterima sebagai suatu keadilan, dikarenakan para budak sendiri menerima hal itu. Namun hal mengenai perbudakan itu mulai berubah cepat ketika

munculnya masyarakat-masyarakat kapitalis, yang mana pada puncaknya sampai penghapusan secara total.

Pembangunan nasional yang kita perlukan sekarang memerlukan peran serta dari seluruh masyarakat agar tujuan pembangunan nasional yang kita cita-citakan dapat segera tercapai. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Garis Garsis Besar Haluan Negara bahwa keberhasilan pembangunan nasional tergantung pada peran serta dari seluruh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut bahwa dalam proses pembangunan maka seluruh rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam proses pembangunan baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Tarik menarik pemahaman tentang gerakan perempuan dalam kontek pemberdayaan perempuan di tengah kehidupan sosial budaya telah berlangsung secara inten. Berbagai aliran pemikiran telah bertebaran di teggah jagad kita ini, pemikiran-pemikiran tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk teori yang kerap digunakan sebagai instrumen pembelaan terhadap realitas apa yang harus di lakukan oleh kaum perempuan.

Macam-macam teori feminisme yang mempunyai aliran yang berbeda untuk memperjuangkan kepentingan perempuan misalnya,¹ aliran feminisme *Fungsionalisme Struktur* dimana mereka menganggap bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari atas bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai masalah keluarga). *Feminisme Liberal* memandang bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakal pada

¹ DR. Mansour Fakih, "Anlisis Gender dan Transformasi Sosial" (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2001) hal 84-87

Akses perempuan terhadap kesempatan dan sumberdaya yang mampu mempengaruhi struktur ekonomi dalam masyarakat masih sangat rendah sebagai akibat belum dilakukannya analisis gender secara proporsional dalam kebijakan ekonomi. Dalam hal ini perempuan mendapat porsi pekerjaan yang dekat dengan peranan tradisionalnya yang umumnya bernilai ekonomis rendah misalnya perempuan masih banyak bergerak di bidang sektor industri kecil atau industri rumah tangga sebagai pekerja keluarga tanpa upah atau dengan upah yang rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan sebagai akibat dari segregasi gender dalam budaya kita menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dalam aktivitas ekonomi, nilai pekerjaan perempuan masih dianggap rendah dari pada kaum laki-laki yang tercermin dalam perbedaan upah yang di terima.

Dalam sektor informal dimana 68,2% angkatan kerja perempuan berbeda, pilihan pekerjaan perempuannya pun masih dipengaruhi oleh peran gendernya misalnya kaum perempuan di sektor informal banyak bergerak di bidang perdagangan bahan pangan dalam skala kecil keterbatasan modal dan akses sumber daya serta kurangnya hak kepemilikan merupakan faktor lain yang mempengaruhi usaha perempuan oleh karena itu perempuan sulit bersaing dalam mengembangkan usahanya.

Seperti diketahui pembangunan nasional ini meliputi di segala bidang termasuk diantaranya pembangunan dalam bidang politik, kaum wanita sebagai anggota masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bidang politik dan pemerintahan, dan untuk saat ini cukup banyak wanita yang berperan di dalam

bidang tersebut walaupun belum mencapai kuota yang diharapkan dari kaum perempuan itu sendiri.

Dalam terminologi barat, partisipasi dilakukan dengan cara memilih pimpinan negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung maupun secara tidak langsung. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti memberikan suara pada pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota salah satu partai politik atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya²

Dalam hal politik wanita merupakan alat mobilisasi kekuasaan atau alat politik yang sangat efektif misalnya kita ambil contohnya pada masa pemerintahan Orde Baru dimana Dharma Wanita, berada di bawah Golkar selalu menjadi instrumen kekuasaan sebesarnya dukungan kaum wanita dalam proses pembangunan pada masa itu cukup besar, namun ternyata tidak ada imbalan yang pantas yang di berikan oleh Golkar kepada kaum perempuan. Dan tidak ada program yang jelas bagaimana untuk melindungi kaum wanita masalah kekerasan rumah tangga, masalah pemerkosaan, bahkan pada masa pemerintahan Orde Baru organisasi-organisasi wanita tidak pernah menyuarakan ekspresi kepentingan kaum perempuan³

Sudah beberapa tahun ini lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya yang menaruh perhatian terhadap gender, mengampanyekan untuk perlunya kuota

² Mariam Budarjo, "*partisipasi dan partai politik*", Jakarta (Gramedia 1982) hal 1-3

³ Drs. Afan Gaffar, "*Poteret Perempuan tinjauan politik, ekonomi, hukum, di zaman orde baru*" Yogyakarta (PSW-UMY dan Pustaka Pelajar 2001) hal 3-9

perempuan duduk di lembaga legislatif. DPR didesak agar memasukan ketentuan tentang keterwakilan perempuan pada amandemen UU Politik dan UU Pemilu yang mana saat ini draf RUU tersebut lagi dibahas oleh Depdagri. Alasan yang diajukan, jumlah perempuan mencapai 51 % penduduk Indonesia tetapi hanya 8% jumlah perempuan di legislatif (lihat tabel).

Melihat kondisi tersebut keterwakilan perempuan secara berimbang dalam legislatif perlu mendapat perhatian khusus. Caranya adanya jumlah kuota perempuan di legislatif. Sebenarnya banyak ide tentang kuota perempuan di legislatif 30% jumlah perempuan yang duduk di legislatif pertama kali muncul dalam sidang Internasional Parliement Unio (IPU) Tahun 1994 yang mana kemudian di rekomendasi lagi oleh konfrensi perempuan sedunia Tahun 1995 di Beijing. Selanjutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan pula melalui resolusi PBB Tahun 1996 dimana ada usulan sebesar 20% kuota perempuan di parelemen.

PERDANDINGAN JUMLAH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM POLITIK PADA PEMILU 1999-2004

Tabel 1

LEMBAGA	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PROSENTASE (%)
MPR	18	177	9,2
DPR	45	455	9
MA	7	40	14'8
BPK	0	7	0
DPA	2	43	4,4
KPU	2	9	18'1
GUBURNUR	0	30	0
BUPATI	5	331	1'5

*Sumber : Data diolah oleh Divisi Perempuan dan pemilu cestro 2001
Pidato Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI pada Semiloka*

Peran perempuan dalam pembangunan, tidak lepas dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pada umumnya memosisikan diri perempuan sebagai kodratnya, yang selalu menerima pasif terhadap kondisi di sekitarnya, emosional dan keibuan dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dicirikan dengan yang lebih rasional, lebih agresif dan lebih aktif, dengan demikian sangat wajar bila wanita hidup dalam rumah tangga, memelihara anak, memberikan perhatian pada suami agar rumah tangga hidup tenteram dan sejahtera, sedangkan laki-laki kerja keluar rumah untuk mencari nafkah.

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utama jender dalam pembangunan nasional, belum dipahami oleh semua pihak yang berkaitan karena sosialisasinya yang masih kurang padahal tujuan Inpres No 9 Tahun 2000 tersebut untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses, berpartisipasi, mempunyai kontrol yang sama dan memperoleh manfaat yang sama dalam pembangunan. Sayangnya kenyataannya di lapangan menunjukkan para pengambil kebijakan dan para pemegang kekuasaan seperti kalangan eksekutif dan legislatif belum memahami benar tentang pentingnya kesetaraan gender.

Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana persepsi dari anggota perlemen dalam memandang politik perempuan, karena hal ini mempunyai daya tarik sendiri bagi penulis di tengah banyaknya tuntutan-tuntutan dalam tentang kesetaraan gender. Dan selain itu dilihat juga peluang dan kendala perempuan dalam menduduki jabatan politik

Untuk dapat menggambarkan sejauhmana parlemen memperjuangkan kepentingan kaum perempuan, maka penelitian ini akan dilakukan di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di karenakan DPRD merupakan suatu lembaga yang membuat kebijakan-kebijakan dan tempat menyalurkan aspirasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat baik itu kaum laki-laki maupun kaum perempuan.

B. Rumusan masalah

Dari uraian-uraian yang telah di sampaikan dalam latar belakang masalah yang mana kemudian menjadi acuan dalam penelian ini dengan melihat fenomena-fenomena yang berkembang ditengah gelombang reformasi. Maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi politisi perempuan terhadap peran politik perempuan?
2. Bagaiman peluang dan kendalah perempuan dalam menduduki jabatan politik khususnya DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

C.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar peran perempuan di dunia politik
- b. Untuk mengetahui persepsi anggota perempuan di Parlemen khususnya di DPRD Yogyakarta sendiri terhadap politik perempuan
- c. Untuk mengetahui seberapa besar kuota perempuan yang ada di parlemen khususnya di DPRD Yogyakarta.

C.2. Manfaat penelitian

Selain dari tujuan penelitian semoga dalam proses penulisan penelitian ada manfaatnya :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbagan pemikiran bagi anggota masyarakat dalam proses memberdayakan kepentingan perempuan khususnya dalam bidang politik
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbagan pemikiran bagi anggota DPRD Yogyakarta dalam memberdayakan perempuan, terutama guna terlaksananya proses demokrasi yang berbasis gender.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan masalah perjuangan perempuan di bidang politik.
4. Hasil penelitian ini untuk memaksimalkan tugas dan wewenang DPRD Yogyakarta yang berbasis gender.

D. Alasan Pemilihan Judul

Kaum perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam aktivitas politik tetapi sampai saat ini bahwa kaum perempuan sering kali di marginalisasikan oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik dewasa ini juga diperlukan untuk menunjang program-program pembangunan dan melihat kondisi obyektif sekarang ini peranan perempuan dalam bidang politik masih perlu diperhatikan.

Adapun keikutsertaan perempuan dalam kegiatan politik antara lain adalah sebagai berikut ikut memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota-anggota

organisasi, atau menjadi wakil rakyat di parlemen. Meskipun diyakini bahwa tingkat pendidikan, pendapatan dan pekerjaan seorang perempuan mempunyai hubungan partisipasi politiknya, karena faktor suami lah yang sangat berperan dalam menentukan pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat kehidupan politiknya. Dan seorang perempuan yang sudah berkeluarga juga akan cenderung menjadi sub-ordinate dari suaminya yang merupakan cermin dari budaya kita sehingga posisi suami mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan yang sangat kuat.

E. Kerangka Teori.

Kerangka dasar teori yang dimaksud adalah teori-teori yang digunakan dalam kegiatan penelitian, sehingga aktivitasnya menjadi jelas sistematis, dan ilmiah adapun teori-teori yang dapat dipakai dalam proses penelitian ini.

E.1. Peranan dan fungsi DPRD sebagai lembaga politik.

Peranan menurut Prof. Dr Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut

“Peranan atau role adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status. Jadi apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya maka ia mengutamakan peranannya.”⁵

Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa peranan yang dijalankan sangat ditentukan oleh status ataupun kedudukan yang dijabatnya. Apabila seseorang atau suatu subyek diperlakukan sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya, karena kedudukannya maka ia telah menjalankan peranannya. Begitu juga peranan yang dijalankan oleh DPRD, DPRD melakukan kegiatan, aktivitas atau berperan

⁵ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi suatu pengantar*,” (Jakarta, CV. Rajawali, 1982) hal 225

sedemikian rupa sebagai upaya untuk mewujudkan atau melaksanakan tugas, atau fungsi karena status yang diembannya.

Peranan DPRD diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh berbagai unsur DPRD seperti anggota, pimpinan, fraksi, komisi dan badan kelengkapan DPRD secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi badan tersebut. Dengan demikian aktivitas unsur-unsur DPRD yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan, merupakan peranan lembaga ini.⁶

E.1.1. Fungsi Perwakilan

DPRD membuat kebijakan atas nama anggota masyarakat yang secara keseluruhan terwakili di dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini DPRD bertindak sebagai pelindung kepentingan dan penyalur aspirasi anggota masyarakat yang diwakilinya.

E.1.2. Fungsi Perundang-undangan

Dalam fungsi ini DPRD mempunyai hak sebagai wakil rakyat untuk menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat kedalam kebijaksanaan formal dalam bentuk undang-undang. Dalam fungsi ini tergolong juga kewenangan DPRD untuk menghasilkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan mengusulkan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) dan mengubah suatu undang-undang (amandemen).

⁶ Arbi Sanit , “ *Perwakilan Politik di Indonesia*,” (Jakarta, CV.Rajawali 1985) hal 46-51

E.1.3. Fungsi Pengawasan

Lembaga ini melindungi kepentingan rakyat, sebab melalui penggunaan kekuasaan yang dilandasi oleh fungsi ini, DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak DPRD. Dengan demikian tindakan-tindakan yang dapat mengabaikan kepentingan anggota masyarakat dapat diperbaiki.

Sedangkan menurut Mariam Budiharjo fungsi pokok badan legislatif ada 2 yaitu⁷ :

1. Menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat Undang-Undang untuk itu DPRD diberikan hak legislatif dan hak untuk mengadakan amandemen terhadap Rancangan Undang-Undang yang di susun oleh pemerintah dan budget.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan tugas ini badan perwakilan diberi hak khusus

Dengan teori memang agak mudah merumuskan fungsi-fungsi legislatif dimana masyarakat selalu menumpukan harapan dan mimpi-mimpinya baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada wakilnya yaitu mereka yang duduk di badan legislatif.

Terkadang harapan itu terlalu muluk dan ideal akhirnya hal itu tinggal harapan, dan realitas kehidupan DPRD tersebut memang mengalami pasang surut

⁷ Mariam Budiharjo, " *Dasar-Dasar Ilmu Politik*," (Jakarta PT.Gramedia 1986) hal 182-183

yang cukup drastis. Seperti telah diketahui keberadaan DPRD sering dipertanyakan banyak pihak, tidak dapat disangkal lagi citra DPRD dalam masyarakat agak mineur dan skeptis dan di kalangan luas DPRD tidak lagi berjalan secara efektif termasuk juga dalam proses memperjuangkan kepentingan perempuan, sikap apatis masyarakat terhadap lembaga DPRD tidak lahir secara spontanitas melainkan melalui suatu proses yang panjang dan berkesinambungan.

E.2. Pengertian politik

Pada umumnya dapat diambil kesimpulan tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa partai politik karena partai telah menjadi fenomena umum, dan telah menjadi keharusan dewasa ini. Menurut Dr. Ichacul Amal dimana ia mengemukaakan bahwa⁸ :

“Partai adalah alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah“
Partai dapat digunakan sebagai pengelompokan yang sudah mapan, sebaliknya partai dapat digunakan untuk menjinakan pihak-pihak yang bermaksud menghancurkan sistem politik dan membawanya kedalam proses politik yang esensinya adalah kompromi.

Selanjutnya Talcott Parson yang dikuitip oleh kartini kartono mengatakan bahwa⁹

“Politik merupakan perbuatan yang berkaitan dengan perjuangan kolektif dengan segenap kebijakannya untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif tertentu”.

⁸ Dr Ichlasul Amal, " *Teori-Teori Mutahir partai Politik,*" (Yogyakarta, PT.Tiara Wacana1996) hal 23.

⁹ Kartini Kartono,"*Pendidikan Politik,*" (Bandung, Mandar Maju 1998) hal 15

Dari beberapa pengertian tentang politik yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa politik adalah kegiatan sekeompok orang yang bertujuan untuk menentukan kebijaksanaan atau policy bahkan kekuasaan guna kepentingan kelompok mereka sendiri.

E.3. Persepsi politisi perempuan terhadap peran politik perempuan.

Apabila dilihat dari historisnya perjuangan perempuan Indonesia dalam bidang politik ternyata perempuan Indonesia cukup tinggi keterlibatannya dalam sektor politik, peranan perempuan dalam bidang politik sudah sejak dulu, misalnya perjuangan Cut Nyak Dien dari Aceh, R.A Kartini dari Jepara dalam bidang pendidikan, Nyi Ahmad Dahlan, R Dewi Sartika dan lain sebagainya. hal ini dapat dilihat dari keikutsertaanya melawan penjajahan bangsa asing kemudian berusaha merebut kemerdekaan serta menghadapi gejolak yang terjadi di dalam negeri.

Pada saat sekarang ini persepsi anggota parlemen sangat diperlukan untuk melihat persepsi anggota parlemen terhadap politik perempuan, karena mereka yang banyak terlibat dalam membuat suatu kebijakan atau suatu keputusan dan juga kita dapat melihat arah dan tujuan perjuangan kaum perempuan di parlemen guna mencapai proses demokratisasi yang berbasis kedaulatan, dimana tidak ada perbedaan antara kaum perempuan maupun kaum laki-laki dalam jabatan politik baik itu anggota parlemen, legislatif maupun dalam jabatan yudikatif sehingga tercipta suatu keadilan yang benar-benar menjunjung tinggi nilai demokratisasi tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Persepsi menurut menurut Drs. Jamaluddin Rakhmat M.sc dalam bukunya Psikologi Komunikasi

Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan

Lain halnya yang dikemukakan oleh Saparinah Sadli persepsi sebagai berikut

Persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana memegang peranan bukan hanya stimulasi yang mengenainya tetapi juga ia sebagai keseluruhannya dengan pengalaman-pengalamannya motivasi dan sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut.

Jadi persepsi merupakan suatu pandangan orang yang menggunakan analisis tentang suatu peristiwa maupun penomena-fenomena yang terjadi dan akan mengambil suatu pendapat atau pandangan

E.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam jabatan politik.

E.4.1 Faktor Budaya

Kebudayaan adalah suatu proses dialektika antara sistem-sistem dalam suatu masyarakat. Sistem tersebut adalah sistem kekuasaan, sistem ekonomi, sistem kepercayaan dan sistem sosial. Kebudayaan adalah suatu proses interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan yang bisa membuat suatu aturan atau norma.

Menurut Arief Budiman dalam bukunya Teori negara dan kekuasaan dan ideologi faktor budaya adalah¹⁰ :

“Faktor budaya adalah semua faktor yang berhubungan dengan ide-ide atau nilai yang di hayati oleh seseorang atau masyarakat dalam alam pikirannya“

¹⁰ Arif Budiman, " Teori Negara idiologi dan kekuasaan, " (Jakarta PT.Gramedia 1996) hal 50-51

Sedangkan menurut Taylor budaya adalah¹¹ :

“Budaya dalam arti yang luas terdiri dari produk-produk tindakan dan interaksi manusia termasuk cipta, karya manusia berupa materi dan non materi. Kebudayaan non materi keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan dan kemampuan-kemampuan dan taat cara lainnya yang peroleh manusia dalam masyarakat”.

Jadi nilai atau ide yang mempengaruhi tingkah laku manusia ini bisa merupakan nilai atau ide yang datang dari masa lalu berupa tradisi atau kebiasaan yang sudah melekat pada sebuah masyarakat sedangkan menurut Mattulada menjelaskan bahwa adanya budaya yang seperti ini akan melahirkan sebuah sistem politik yang otoriter rakyat akan takut untuk mengambil inisiatif untuk “melawan” pemerintah yang mempunyai hak untuk menguasai mereka. Menurut Mattulada perubahan ini akan terjadi apabila dimulai dengan dari lapisan atas masyarakat sehingga akan sulit terjadi sistem politik yang demokratis..

E.4.2. Faktor Sosial Ekonomi

Kalau kita berbicara tentang perubahan sosial yang mengarah kelebih baik kita terlebih dahulu harus melihat kondisi obyektif yang terjadi di lingkungan sekitar kita salah satunya adalah faktor sosial suatu masyarakat atau suatu rejim tersebut. Menurut Cardoso yang di maksud dengan faktor-faktor sosial adalah *kombinasi dan interaksi dari kekuatan-kekuatan sosial di dalam masyarakat.*¹²

Sedangkan Marx dengan teori keterasinganya (*alienation*), untuk melihat nasib perempuan dimana juga ditekan oleh kapitalis maupun patriarki sehingga tidak

¹¹ Durkheim, " *Ilmu sosial Dasar Teori dan konsep Ilmu Sosial,*" (Bandung, PT. Dieresco 1993) hal 31.

¹² Arif Budiman, op.cip. hal 47-48

memungkinkan mereka untuk mencapai nilai-nilai esensinya sebagai perempuan dan manusia.

Sistem sosial merupakan pendekatan lain untuk menganalisis suatu masyarakat, teori sosial juga dikenal dengan teori structural-fungsional yang menganggap masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan (*equilibrium*). Asumsi dasarnya bahwa setiap struktur dan sistem sosial adalah fungsional terhadap yang lain.

Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional berinteraksi ke dalam bentuk suatu keseimbangan, asumsi dasar struktur-fungsional menurut Durkheim dalam bukunya ilmu sosial dasar teori dan konsep ilmu sosial ada beberapa hal :

1. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang merupakan bagian- bagian yang saling berkaitan antara satu sama lainnya.
2. Hubungan antar setiap bagian adalah bersifat saling mempengaruhi dan timbal balik
3. Sistem sosial cenderung bergerak ke arah yang lebih dimanis maksudnya menganggap perubahan yang datang dari luar dan memelihara perubahan yang terjadi agar perubahan yang terjadi berjalan secara minimal.
4. Sistem sosial selalu mengarah ke integrasi sosial, melalui penyesuaian-penyesuaian, ketegangan-ketegangan dan proses institusionalisasi.

E.4.3. Faktor Agama

Dalam beberapa tahun terakhir ini masalah perempuan di Indonesia menjadi perkembangan yang sangat pesat, yang membahas tentang pentingnya

perempuan kedudukan dan keterlibatan perempuan dalam dalam proses transformasi masyarakat.

Kehidupan politik demokratis dan ekonomi modern, baik itu kapitalis maupun itu sosialis, telah membangkitkan tentang hak-hak perempuan. Dimana perempuan tidak lagi dijadikan anggota masyarakat kelas dua, sebagai mana terjadi pada masyarakat-masyarakat feodal, dan mereka menolak diberlakukan hak milik laki-laki bahkan mereka menolak berstatus sosial lebih rendah dari laki-laki dan mereka menuntut kesetaraan disegala bidang.

Islam telah membicarakan hak-hak perempuan secara rinci, baik dalam al-Quran maupun dalam rumusan syariah (hukum Islam) hak itu mencakup masalah perkawinan, perceraian, pemilikan harta benda perwarisan dan pemeliharaan anak.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa antara wanita dan pria sama sekali tidak ada diskriminasi. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kodrat dan martabatnya yang telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Pencipta secara bijaksana. yang membedakan antara satu dengan yang lainnya itu diukur dengan kriteria “ketaqawaanya”. Misalnya saja yang terdapat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang kedudukan wanita

“ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling berqawa diantara kamu. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al Hujarat ayat 13)

E.5. Kuota Perempuan di parlemen

Megawati sebagai Presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia merdeka menjadi suatu fenomena yang luar biasa dalam struktur masyarakat yang masih kuat dengan kultur patriarkinya. Banyak kalangan khawatir termasuk di dalamnya LSM justru kenaikan Megawati tidak menunjukkan pesahabatan dengan gerakan perempuan yang ada di Indonesia saat ini, bahkan tidak ada gagasan tentang gerakan perempuan yang orisinal yang lahir dari pemikirannya. Misalnya saja kasus TKW di luar negeri, kasus pemerkosaan di Aceh ketika terjadi DOM dan lain sebagainya.

Citra politik itu kasar, keras dan jahat telah menakutkan telah menakutkan perempuan secara psikologis, apalagi untuk terjun ke dunia politik perempuan harus mendapat restu dari keluarga karena mereka masih dibebani masalah mengurus keluarga. Perempuan juga dituntut lebih tinggi dari laki-laki kalau mau dilihat oleh masyarakat¹³. Kuota menurut Khofifah Indar Parawansa kuota adalah keterwakilinya kaum perempuan atau adanya jumlah kaum perempuan untuk menduduki jabatan strategis guna mengambil kebijakan politik”

Selanjutnya Drude Dahlerup, associati Professor ilmu politik university of Aarhus di Denmark. Mengemukakan bahwa kuota dianggap perlu dikarenakan¹⁴ :

Kuota bagi perempuan bukan mendiskriminasikan, tetapi memberikan kompensasi atas hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan dari keterlibatannya secara adil dalam proses politik.

1. Kuota memperlihatkan secara tidak langsung bahwa terdapat beberapa jenis perempuan secara bersama-sama duduk di dalam suatu komite atau majelis,

¹³ Kompas, 11 Maret 2002

¹⁴ Budi Shanti, " *Jurnal Perempuan*, " (Jakarta Edisi 19/2001) hal 24-26

degan demikian meminimalisir tekanan yang sering dialami oleh sebagian perempuan.

2. Perempuan mempunyai hak representasi yang setara
3. Pengalaman perempuan diperlukan dalam bidang kehidupan politik
4. Perempuan mempunyai kualitas seperti laki-laki, tetapi kualifikasi perempuan dinilai rendah dan diminimalkan didalam sistem politik yang didominasi oleh laki-laki.
5. Pengenalan kuota akan menyebabkan konflik tetapi sementara.
6. Fakta bahwa partai-partai politik yang mengontrol masalah pencalonan, dan bukan terutama para pemilih yang menentukan siapa yang akan terpilih.

Perdebatan demokrasi tidak hanya dari sistem itu sebenarnya, tidak hanya dipandang dari argumen-argumen tersebut. Demokrasi tidak hanya dipandang dari kuota melainkan dilihat dari metode apa yang digunakan untuk mencapai kuota tersebut. Ada 3 metode yang sering di gunakan *pertama* kuota menurut undang-undang dimana perempuan harus membentuk sekurang-kurangnya suatu proporsi minimal dari wakil yang dipilih. *Kedua* partai-partai yang ada didesak untuk menjadikan kandidat perempuannya sebagai seorang kandidat yang pasti menjadi seorang parlemen. *Ketiga* partai politik menentukan kuota informal untuk menentukan jumlah anggota partainya yang berjenis kelamin perempuan untuk duduk di kursi parlemen.

Di Indonesia sendiri, wacana kuota ini semakin gencar dicanangkan dalam 2 tahun belakangan ini. Namun perdebatan tentang metode apa yang digunakan masih menjadi perdebatan yang panjang baik itu di kalangan politis maupun dikalangan para pengamat, menurut Khofifah sistem kuota bisa dilakukan dengan dua langkah *pertama* melalui sistem legislasi nasional sedangkan yang *kedua* dengan prakarsa sistem politik.

E.6. Kendalah dan peluang perempuan dalam jabatan publik

Ketika perempuan adanya keinginan untuk menduduki suatu jabatan politik tidak mungkin tanpa adanya suatu kendalah atau problematika apalagi kita berada dalam budaya yang masih kuat dengan nilai-nilai religus dan budaya patriarki.

Adapun kendala ketika perempuan menduduki jabatan publik

Aung San Suu Kyi. Mengemukakan kendala pokok perempuan dalam memasuki dunia publik (parlemen) sebagai berikut¹³ :

1. Kurangnya dukungan dari partai politik
2. Kurangnya koordinasi dan dukungan jaringan antara anggota parlemen perempuan dengan organisasi publik lainnya.
3. Adanya norma-norma berorientasi laki-laki dan struktur yang didominasi laki-laki mengurangi partisipasi publik perempuan dan dapat mengarah pada kepercayaan diri sendiri yang rendah.
4. Mobilisasi dukungan media yang tidak mencukupi
5. Kurangnya pelatihan dan pendidikan perempuan yang berorientasi pada kepemimpinan
6. Sistem pemilihan umum yang tidak kondusif bagi partisipasi perempuan
7. Kurangnya reservasi kuota.

Sedangkan menurut Marwan Daud Ibrahim kendalah perempuan untuk tampil di barisan depan di berbagai bidang¹⁴.

1. Hambatan fisik dimana perempuan dibebani tugas “kodrat” untuk mengandung, melahirkan dan menyusui. Sehingga keharusan ini mengurangi keleluasaan mereka untuk tampil terus menerus dalam berbagai bidang.
2. Hambatan teologis, dimana perempuan dipandang sebagai makhluk di ciptakan untuk laki-laki. Termasuk mendampingi mereka, menghibur dan mengurus keperluannya.
3. Hambatan sosial budaya, terutama dalam bentuk *stereotipikal*. Diman memandang perempuan sebagi sebagai makhluk yang pasif, lemah, perasa, tergantung dan menerima keadaan. Sebaliknya, laki-laki dipandang sebagai

¹³ Budi Santi, *Jurnal Perempuan* Op.Cit hal 34

¹⁴ Marwan Daud Ibrahim, *perempuan Indonesia pemimpin masa depan* (Jakarta Sinar harapan 1991) hal 16

- mahluk yang kuat, cerdas, mandiri dan sebagainya dimana pandangan menempatkan laki-laki secara sosio-kultural lebih tinggi derajatnya dari perempuan.
4. Hambatan sikap pandang, hambatan bisa dimunculkan oleh pandang dikotomistis antara tugas perempuan dan laki-laki.
 5. Hambatan histories, kurangnya nama perempuan disejarah masa lalu bisa membenarkan ketidakmampuan perempuan untuk berkiprah seperti halnya laki-laki.

Adapun peluang yang dapat diambil oleh kaum perempuan ketika mereka bergelut di sektor publik.

1. Dengan cukup majunya era informasi yang didukung oleh kemajuan transportasi, hal ini telah membuka peluang dan kesempatan bagi perempuan, bersama laki-laki untuk membuka wawasan berfikir mereka.¹⁵
2. Dengan adanya kajian-kajian perempuan di sekolah dan media masa telah membantu perempuan untuk membedakan antara mitos dan kodrat. Sehingga perempuan bisa tampil dipanggung publik sama halnya dengan kaum laki-laki.¹⁶
3. Perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam bidang pembanguana nasional.¹⁷
4. Perlu meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan untuk mampu memanfaatkan kesempatan kerja.

F. Definisi konsepsional

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya juga diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian. Konsep sebenarnya adalah menjelaskan sesuatu dengan kata-kata atau istilah lain atau sinonimnya yang sudah di pahami oleh pembaca. Dalam penelitian ini akan menggunakan sebagai definisi konsepsional adalah sebagai berikut :

¹⁵ Marwan Daud Ibrahim, Op. Cit hal 16

¹⁶ Marwan Daud Ibrahim Ibid hal 17

¹⁷ Suryoto Usman, "Wacana Perempuan dalam Keindonesian dan emoderenan," (Jakarta Cidesindo dan UII 1999) hal 247

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu lembaga perwakilan untuk menjalankan wahana demokrasi, yang berasal dari bermacam-macam partai politik disuatu daerah.
2. Persepsi adalah suatu pandangan seseorang tentang suatu gejala atau suatu fenomena yang sedang terjadi dan berusaha untuk memberikan reaksinya terhadap fenomena-fenomena tersebut.
3. Partai adalah sebuah organisasi massa untuk mempertemukan dan menyatukan aneka ragam kehendak untuk dirumuskan menjadi kehendak bersama dalam satu kelompok.
4. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi. Nilai-nilai dan cita-cita yang sama, kelompok ini berusaha untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional, guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka dalam sistem politik yang berlaku.
5. Kuota adalah adanya ketentuan jumlah atau proporsi bagi kalangan tertentu dalam jabatan tertentu sehingga tidak terjadinya diskriminasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.
6. Peluang adalah suatu kesempatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk dapat melakukan apa yang dicita-citakannya bagi kepentingannya atau kelompoknya.

7. Hambatan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghalangi suatu kelompok untuk melakukan keinginnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional menyatakan bagaimana operasi atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator dari konsep yang dimaksud¹⁸ Dengan demikian sebelum suatu penelitian dilakukan maka perlu dioperasionalkan terlebih dahulu.

Definisi operasional dalam penelitian ini dapat di lihat dari :

1. Persepsi politisi perempuan terhadap peran politik perempuan
 - Undang-Undang perempuan yang berbasis gender
 - Kuota Perempuan di Parlemen.
 - Program-program pemerintah yang berbasis gender
 - Pandangan anggota DPRD Propinsi DIY khususnya perempuan tentang UU pemilu Pasal 65 ayat (1) tentang kuota 30% perempuan di parlemen
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kendala perempuan dalam menduduki jabatan publik maka digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

Adapun kendala ketika perempuan untuk menduduki jabatan publik

1. Hambatan fisik.

¹⁸ Dr.Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah,*" (Bandung, Sinar Baru. 1988) hal 94

- Apakah perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengambil keputusan dalam jabatan publik
- Perempuan sering kali dianggap sebagai yang irasional, lemah lembut, dan tidak rasional.

2 Hambatan teologis

- Sejauhmana agama memberikan kedudukan kepada perempuan untuk menduduki jabatan publik
- Apakah agama melarang perempuan menjadi seorang pemimpin.

3 Hambatan sosial budaya,

- Seberapa besar pengaruh budaya patriarki dalam memandang perempuan dalam jabatan publik.
- Apakah masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai pengurus pekerjaan domestik.

4. Kurangnya dukungan dari partai politik

- Seberapa besar perhatian partai politik terhadap kepentingan perempuan
- Seberapa besar proporsi yang diberikan partai politik untuk perempuan untuk menduduki jabatan publik

3. Adapun adapun indikator-indikator yang digunakan untuk melihat peluang yang dapat diambil oleh kaum perempuan ketika mereka bergelut di sektor publik.

1. Dengan cukup majunya era informasi dan teknologi

- Bagaimana usaha yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menambah pengetahuannya tentang hak-hak perempuan dalam jabatan publik.

Dimana metode lebih menekankan pada strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.

Jenis penelitian ini adalah tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif karena sesuai dengan permasalahan yang mau diteliti yaitu ingin menerangkan atau menjelaskan peristiwa atau fenomena-fenomena yang ada. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Irawan Soehartono, bahwa “Apabila penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang satu gejala atau hubungan dengan dua gejala atau lebih.”¹⁹

H.2. Unit Analisis

Pada unit analisis disini dibatasi artinya bahwa dalam penelitian tersebut tidak semua anggota DPRD Yogyakarta diambil sebagai sampling, akan tetapi dibatasi beberapa saja (diambil data) yaitu semua anggota DPRD Yogyakarta yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah sebanyak lima orang yaitu Ibu Hj. Ida Fatimah AZ dari F-KB, Ibu Hj. Zainatul Mufruchah, SH dari F-KB serta Ibu Gudiyana Lindawati, Ibu Pratiwi Ngesti Utami dan Ibu Moeharnani Soekarno semuanya dari F-PDI-P.

H.3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 macam jenis data yaitu data yang bersifat primer dan jenis data yang bersifat sekunder.

¹⁹ Dr.Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah,*” (Bandung, Sinar Baru. 1988) hal 94

H.3.1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh oleh seorang penulis yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu keterangan dari pihak yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun pihak-pihak yang mempunyai peranan penting dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Yogyakarta khususnya kaum perempuannya dan juga orang-orang yang berkerja di lembaga DPRD Propinsi DIY.

H.3.2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh oleh seorang penulis atau peneliti melalui dokumentasi yang berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, kutipan hasil penelitian dan data statistik, media masa, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses penelitian ini.

H.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini, meliputi teknik kuoesioner, teknik dokumentasi, observasi, wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan.

H.4.1. Teknik Kuoesioner.

Adalah dimana teknik kuoesioner ini memperoleh data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang dijadikan sampel

penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kuoesioner yang bersifat terbuka yang mana penulis tidak memberikan jawaban melainkan ditulis sendiri oleh responden.

Sedangkan Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Efendi¹⁸ dalam bukunya metode penelitian survei. Tujuan pembuatan kuoesioner adalah :

1. Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei
2. Memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin dalam penelitian.

H.4.2. Teknik wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung berbagai pandangan, opini dan penilaian khusus dari berbagai fraksi terutama kaum perempuannya yang ada di DPRD tentang kebijakan yang ditempuh yang berkaitan dengan persepsi anggota DPRD perempuan dalam memandang politik perempuan. Teknik wawancara yang dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang beberapa aspek yang berkaitan dengan penelitian.

Terutama kepada responden yang mempunyai peranan kunci dalam persepsi dalam memandang politik perempuan, seperti anggota DPRD khususnya kaum perempuannya yang duduk di fraksi, dan tidak menutup kemungkinan hadirnya informasi lain.

H.5. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif teknik analisis data lebih banyak menggunakan “*cross cheking analysis*“ untuk data primer data hasil wawancara dari sumber data di konfirmasikan dengan hasil wawancara dengan sumber data-data yang lain, dari sini dapat diketahui ada tidak perbedaan pendapat, pandangan atau pemikiran dari suatu obyek di antara sumber data tersebut.

Data hasil wawancara juga di cross check dari hasil pengamatan (observasi) demikian pula untuk data sekunder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan persepsi anggota perlemem terhadap politik perempuan akan dikaitkan dengan data hasil pengamatan, literatur-literatur dan wawancara. Dengan demikian, analisis data di lakukan dengan cara menggunakan cross check terhadap data yang diperoleh melauai sumber-sumber lain, sehingga validitas dan reabilitas data terjaga.